

Politik Identitas, Radikalisme dan Intoleransi Jadi Ancaman Demokrasi

written by Harakatuna



Harakatuna.com. Yogyakarta - Pancasila sebagai ideologi yang asli lahir dari Indonesia harus dipertahankan dan terus diedukasi karena telah terbukti mampu menjaga keutuhan Indonesia. Hal ini untuk menghadang gempuran media sosial dengan informasi yang salah (hoax), kampanye ideologi khilafah, radikalisme dan intoleransi yang menyerbu jelang tahun politik 2024.

“Pancasila ideologi terbaik untuk Indonesia. Lima sila dari Pancasila bisa diterima semua agama yang ada di Indonesia. Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, bahkan sesuai dan selaras dengan ajaran Islam,” tegas Anggota DPR/MPR RI, Drs HM Idham Samawi dalam Forum Group Discussion (FGD) yang dihelat Aliansi Bela Garuda (ABG) di Hotel Musafira Jalan Surokarsan Yogyakarta, Sabtu (03/12/2022).

FGD dengan tema Politik Identitas dan Radikalisme Intoleran Sebagai Ancaman Demokrasi ini juga menghadirkan pembicara Pengamat Hukum dan Keamanan, Rakyen Adibrata SH CCTP dan tokoh muda Muhammadiyah Dr Subkhi Ridho.

“Bahkan Rasulullah dalam Piagam Madinah juga memberikan toleransi pada umat beragama lainnya,” tegas Idham.

Dijelaskan dalam konsep Islam hubungan manusia dengan Allah (Habluminallah) dan hubungan manusia dengan manusia (Habluminnas) selaras dengan sila-sila Pancasila. “Islam mengajarkan Tauhid, kemanusiaan, ukhuwah (persatuan), musyawarah juga sosial peduli kaum dhuafa dan yatim (sosial),” tandas Idham.

Sedangkan Rakyana Adibrata menyebutkan politik memang tidak bisa dilepaskan dengan identitas untuk menyatukan. “Hanya saja politik identitas yang tidak memberi toleransi pada yang berbeda justru akan menjadi api dalam sekam menghancurkan grassroot menjadi terkotak-kotak,” tegasnya

Rakyana yang mengamati dan mengalami langsung dinamika politik identitas di DKI Jakarta saat pemilihan Gubernur menyatakan hingga saat ini masih terasa masyarakat menjadi terbelah. “Bahkan hingga Pemilihan Ketua OSIS di sekolah negeri di Jakarta ada guru yang mengarahkan ke kandidat ke siswa Muslim,” jelasnya.

Lebih lanjut Dr Subkhi Ridho menyebutkan perang ideologi yang intens di internet dengan pelaku itu-itu saja namun mempunyai banyak akun dan tersebar luas harus bisa diantisipasi dengan cepat dan tepat melalui internet dan gerakan nyata tidak berhenti dalam diskusi saja.

“Generasi saat ini tidak terbiasa membaca, lebih suka langsung melihat dan mendengar melalui medsos dari hape. Karenanya untuk edukasi bisa juga dilakukan melalui konten di TikTok, Instagram, Twitter, dan medsos lainnya,” tegasnya.

Acara ditutup dengan pernyataan sikap Ketua Umum ABG Totok Ispurwanto yang dibacakan Ketua Panitia Abdul Haris Nepe. “Menolak tegas praktek politik identitas, radikalisme intoleransi yang mengancam demokrasi. Mengutuk pihak yang menggunakan untuk jualan politik meraih kekuasaan,” ujarnya.

Selanjutnya mengajak seluruh elemen masyarakat menjauhi politik identitas, radikalisme intoleransi yang dapat menghancurkan keutuhan berbangsa dan bernegara. “Mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan toleransi jelang hajatan demokrasi 2024,” tegasnya.